



Pemkot Yogya Antisipasi Bencana

Yulianingsih

Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, pada akhir Januari hingga awal Februari 2012 ini merupakan puncak musim penghujan. Karenanya BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang berhulu di kaki Merapi untuk waspada. Peralunya, ancaman banjir lahar dingin semakin nyata di musim penghujan ini.

Meski begitu, Pemkot Yogyakarta telah melakukan antisipasi dini terhadap ancaman bencana tersebut. Menurut Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, antisipasi bencana di Yogyakarta dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Hal itu dilakukan melalui berbagai program, baik pelatihan antisipasi bencana (simulasi), pembangunan *early warning system* (EWS) hingga penentuan titik kumpul dan kesiapan logistik. "Pada prinsipnya, antisipasi

bencana yang kita lakukan berbasis masyarakat," terang Haryadi.

Koordinator Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPD) Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso mengatakan, saat ini pihaknya mulai melakukan pendataan terhadap komunitas-komunitas peduli bencana di wilayah yang akan dilakukan oleh kecamatan.

"Ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh komunitas peduli bencana agar bisa membantu pemerintah untuk penanganan bencana, setidaknya ada lima syarat," terangnya.

Menurut dia, sejumlah syarat itu adalah komunitas beranggotakan penduduk setempat di masing-masing kecamatan, memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki badan hukum, memiliki posko di masing-masing wilayah dalam hal ini kecamatan, dan memiliki relawan minimal 50 orang per kecamatan.

Khusus untuk syarat memiliki badan hukum, Eko menjelaskan, syarat tersebut tidak harus dipenuhi oleh masing-masing

komunitas di tingkat kecamatan, tetapi bisa menggunakan syarat badan hukum yang sudah dimiliki komunitas yang sama di tingkat kabupaten.

Saat ini, sudah ada sejumlah komunitas peduli bencana yang sudah ada di masyarakat di antaranya adalah Tagana, Pareanom, Pemerti Code, dan X-Code. Komunitas, lanjut Eko, adalah bagian penting dalam upaya penanganan bencana di wilayah, karena pemerintah tidak bisa melakukan penanganan bencana seorang diri.

"Komunitas atas sepengetahuan Ketua RT atau RW setempat bisa mengajukan kebutuhan logistik masyarakat yang terkena bencana ke kecamatan," kata dia.

Permintaan kebutuhan logistik yang diajukan oleh komunitas tersebut kemudian akan mendapat verifikasi oleh camat sehingga tidak serta merta seluruh permintaan dipenuhi. "Nantinya, akan ada verifikasi dari kecamatan sebelum kebutuhan logistik itu diberikan," urainya.

Dalam upaya penanganan bencana, kecamatan memiliki peran strategis karena akan menjadi pihak yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Kecamatan juga akan memiliki gudang logistik yang berisi stok makanan atau pun kebutuhan kesehatan untuk penanganan bencana.

Menurut dia, di masing-masing kecamatan akan memiliki *buffer stock* berbagai kebutuhan penanganan bencana seperti makanan dan juga kebutuhan kesehatan. Nantinya, masyarakat di daerah bencana yang membutuhkan kebutuhan logistik tersebut dapat mengajukan permintaan secara langsung ke kecamatan.

"Selama ini, permintaan kebutuhan logistik untuk penanganan bencana masih kerap diajukan ke posko induk yang ada di kompleks kantor wali kota," ungkap dia.

Dengan adanya *buffer stock* di masing-masing kecamatan, lanjut Eko, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat dan lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan yang diajukan masyarakat.

kan Kepada Yu
 /Walikota Yogya
 /Wakil Walikota
 Sekretaris Daer
 Asisten
 san Kepada Y

anjut
 anggap
 tahui
 ers

Kecamatan akan memiliki persediaan kebutuhan penanganan bencana.



"Sedangkan posko induk di balai kota berfungsi sebagai koordinator. Posko induk hanya akan melayani permintaan logistik dari kecamatan," katanya.

Ja berharap, dengan kebijakan tersebut, maka semua pihak dapat bersama-sama melakukan penanganan bencana. Kecamatan akan dibantu oleh petugas dari kepolisian setempat, TNI, dan unsur terkait termasuk komunitas peduli bencana di wilayah.

Selain menyiapkan kebutuhan logistik, BKPBD Kota Yogyakarta juga melakukan penanganan kerusakan fisik sementara apabila kerusakan tersebut dinilai membahayakan masyarakat umum.

"Kalau ada kerusakan fisik yang sifatnya membahayakan banyak orang, maka BKPBD akan menanganinya dengan melakukan perbaikan non permanen. Tetapi, jika tidak membahayakan masyarakat umum, kerusakan itu tidak ditangani BKPBD," kata Eko. ■

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Asisten Perekonomian dan Pemba 2. Kantor Penanggulangan Kebakara	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005